

RENCANA KERJA



DINAS PMD KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi penunjang urusan wajib pemberdayaan masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government). Rencana Kerja ini merupakan bentuk tanggungjawab formal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahun 2019 berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. Hal ini dilaksanakan melalui penyesuaian pada rumusan tujuan, sasaran serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program dan Kegiatan Tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 berserta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Dengan demikian, kami berharap Rencana Kerja Tahun 2020 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermafaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2020 guna mendorong pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam program pemberdayaan

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Watampone, 2019
Kepala Dinas PMD Kab. Bone

H. A. ARSYAD, SH, M.Si
Pangkat. Pembina Tk.I
Nip. 19620110 199101 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Bone	6
2.2 Sumberdaya Dinas PMD Kabupaten Bone	7
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Bone	8
2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD Kab. Bone.....	12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan	14
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih.....	15
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	17
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	19
BAB IV TUJUAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Bone	25
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Bone.....	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
5.1 Program dan Kegiatan	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumberdaya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone .	7
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone..	8
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone.....	9
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD Kab. Bone	11
Tabel 3.1 Telaah Visi dan Misi Terpilih	16
Tabel 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi dan Permasalahan Pelayanan SKPD.....	18
Tabel 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	20
Tabel 3.4 Telaah Sasaran Jangka Menengah pada Dokumen KLHS	22
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	26
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	28
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas PMD Kabupaten Bone	33
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	43

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagaimana yang termuat pada pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai urusan wajib di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Pemerintah Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 yang dituangkan yang memuat arah dan kebijakan teknis pembangunan sektoral yang berkaitan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercantum dalam RENSTRA DINAS PMD Kabupaten Bone, maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas PMD diawali dengan Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, kemudian

dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 -2023, hasil evaluasi hasil Renja DPMD tahun 2018, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2019, untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja serta memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja DPMD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra, yang dilanjutkan dengan Tahapan Penyusunan Rancangan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2020 dimaksudkan :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.;
2. Sebagai panduan dalam pencapaian target perencanaan dan kinerja pembangunan tahunan secara lebih terarah dan berkesinambungan
3. Menunjang terwujudnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai rencana dan tahapan yang telah ditentukan.
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan tahunan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2020 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , keterkaitan antara Renja DPMD dengan dokumen RKPD, Renstra DPMD 2018 - 2023, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja maupun IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi yang ada dimasyarakat dan usulan yang disampaikan pada saat pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan dan musrenbang kabupaten.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II

HASIL EVALUSI RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone pada tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, pelaksanaan kinerja DPMD Kabupaten Bone ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), Anggaran DPMD tahun 2018 sebesar Rp. 9.248.227.343,- terealisasi sebesar Rp. 9.096.032.460,- atau pencapaian 98,35 %.

Tabel 1.

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

No.	Belanja	Anggaran	Realisasi	% Fisik	% Keu
1.	Belanja Tidak Langsung	2.348.277.343	2.206.333.960	-	93,96
2.	Belanja Langsung	6.900.000.000	6.889.698.500	100	99,85

Anggaran Tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dipergunakan untuk membiayai Program rutin dan teknis sebanyak 11 program dan 35 kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 835.145.800,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 835.145.800,-** atau 100 persen dan realisasi fisik sebesar **100** persen. Program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) **Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**, dengan capaian yaitu Tersedianya Sarana Perkantoran berupa Telepon dalam rangka kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**, dengan capaian yaitu Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan berupa Pembayaran Honorarium PPTK sebanyak 8 Orang, Honorarium Pengguna Anggaran, Honorarium PPK – SKPD, Honorarium Pembantu Pejabat PPK-SKPD sebanyak 1 orang, Honorarium Pengurus Barang/Jasa 1 orang, Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa sebanyak 3 Orang, Honorarium Bendahara 1 orang , Honorarium Pembantu Bendahara sebanyak 3 Orang, Staf Pengelolah Administrasi 5 Orang, Operator SIPPD 1 Orang, Operator Siakuda 1 orang, Operator Simbada 1 orang, Operator Sirup 1 orang, Tenaga Kontrak sebanyak 35 orang, Cleaning Service 2 orang dan Sopir 1 orang.
- 3) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**, dengan capaian yaitu Tersedianya buku bacaan berupa Surat Kabar dan Majalah dalam rangka Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan PNS sebanyak 31 Orang selama 1 Tahun Anggaran
- 4) **Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah**, dengan capaian yaitu Terkoordinasinya Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas – tugas Perkantoran selama 1 Tahun Anggaran.
- 5) **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan capaian yaitu Terpenuhinya Alat Tulis Kantor berupa ATK dan Materi, Terpenuhinya Cetakan dan penggandaan berupa Balangko SPPD, Kwitansi, Ceklis, SSP, Spanduk dan Fotocopy dan Makanan dan Minuman Tamu selama 1 tahun anggaran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 951.476.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 951.476.800,- atau 100 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. Program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**, dengan capaian yaitu Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran berupa Mobil 1 Unit, Motor 4 Unit, dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas – tugas Perkantoran.
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**, dengan capaian yaitu Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran berupa TV 1 Buah, Camera 2 Buah, Proyektor 1 Buah, dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas – tugas Perkantoran.
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**, dengan capaian yaitu Terpenuhinya Sarana Perkantoran berupa Absensi 1 Buah, Notebook 8 Buah, Printer 4 Buah, Scanner 2 Buah, Kelengkapan Komputer 5 Buah, dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas – tugas Perkantoran.
- 4) Pengadaan Mebeleur**, dengan capaian yaitu Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran berupa Kursi 5 Buah, Almari 5 Buah, dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas – tugas Perkantoran.
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**, dengan capaian yaitu Terpeliharanya Gedung Kantor berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun anggaran.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**, dengan capaian yaitu Terpeliharanya Kendaraan Dinas berupa Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 Unit dan Kendaraan Roda selama 1 tahun anggaran.
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor**, dengan capaian yaitu Terpeliharanya Alat – alat Perlengkapan Kantor berupa AC, Komputer, Laptop, Print selama 1 Tahun anggaran.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.827.400,- dengan realisasi keuangan Rp. **77.827.400,-** atau 100.00

persen dan realisasi fisik sebesar 100.00 persen. program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD**, dengan capaian yaitu Tersedianya Dokumen –dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dalam tupoksi Organisasi untuk satu Tahun anggaran.
- 2) **Penyusunan Laporan Keuangan semesteran**, dengan capaian yaitu Tersedianya Dokumen –dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dalam tupoksi Organisasi untuk satu Tahun anggaran

4. **Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 477.379.000,-** dengan realisasi keuangan Rp. **472.823.906,-** atau 99.05 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) **Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pedesaan dalam Panerapan TTG (Penyelenggaraan Gelar TTG)**, dengan capaian yaitu terlaksananya Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional yang ke XX di Bali.
- 2) **Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam Pendataan Profil Desa/Kelurahan**, dengan capaian yaitu Tersedianya Sumber Daya Manusia/Kelurahan yang mampu melakukan pendataan serta pengimputan Profil Desa dan Kelurahan yang berbasis Teknologi Informasi, Tersedianya Dokumen Profil Desa dan Kelurahan, Data Profil desa dan Kelurahan Berbasis sistem informatika, menampilkan profil desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang mencerminkan kondisi real daerah dengan menggunakan tampilan antar muka yang dinamis dan interaktif sehingga dapat diakses lebih muda, komprehensif dan efesien, dari 372 Desa/Kel. Tersisa 63 Desa/Kel. Yang belum mengentri Data Profil Desa/Kel.
- 3) **Sosialisasi dan Pelatihan Lembaga Adat Desa**, dengan capain yaitu Sebanyak 354 Orang yang terdiri dari 328 Kepala Desa dan 24 Camat Sekabupaten Bone mengikuti sosialisasi Lembaga Adat Desa dalam

rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam melestarikan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal yang terdapat di desa.

- 4) **Rapat Koordinasi Pendamping Desa**, dengan capaian yaitu Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman serta tupoksi masing – masing para pendamping desa.

5. **Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.119.920.000,-** dengan realisasi keuangan **Rp. 2.119.920.000,-** atau 100.00 persen dan realisasi fisik sebesar 100.00 persen. program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) **Pembinaan Kawasan Pedesaan**, dengan capaian yaitu Terlaksananya Pembinaan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Tonra (Desa Libureng, Desa Samaenre, Desa Padatuo, Desa Rappa, Desa Bulu-bulu, Desa ujunge, Desa BonePuteh, Desa Bacu), Kecamatan Kajuara (Desa Pude, Desa Tarasu, Desa Ancu, Desa Angkue, Desa Polewali, Desa Mallahae, Desa Padaelo, Desa Massangkae), Kecamatan Lamuru (Desa Barakkae, Desa Poleonro, Desa Massenrengpulu, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja (Desa Ujunglamuru), Kecamatan Bengo (Desa Selli) dan Kecamatan Libureng (Desa Pitungpidange, Desa Suwa, Desa Laburasseng, Desa Tappale, Desa Wanuwawaru, Desa Polewali) Kecamatan Cenrana (Desa Laoni, Desa Latonro, Desa Panyiwi), Kecamatan Tellusiattinge (Desa Mattoanging, Desa Lamuru) dalam rangka pengembangan hasil produksi masing – masing kawasan.

- 2) **Pelatihan dan Publikasi Potensi Ekonomi Komunitas Nelayan Kawasan Pedesaan**, dengan capaian yaitu Meningkatnya Kualitas Comunitas Nelayan di kawasan Pedesaan Kecamatan Tonra desa Bulu-bulu, Desa Padatuo, Desa Ujunge, Desa Bone Pute, Desa Libureng, desa Samaenre, Desa Rappa, Desa Bacu dan Kecamatan Kajuara Desa Angkue, Desa Ancu, Desa Mallahae, desa Massangkae, Desa Polewali, Desa Tarasu, Desa Pude, Desa Padaelo, Kecamatan Liburen Desa Pitunpidange, Desa Suwa, Desa Wanawaru, Desa Laburesseng, Desa Tappale, Desa Polewali, Kecamatan Lamuru Desa Poleonro, Desa Barakkae, Kecamatan Bengo Desa Selli, Kecamatan Lappariaja Desa Ujunglamuru.

- 3) **Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal BUMDES**, dengan capaian yaitu Terbinanya 303 BUMDES di 24 Kecamatan Sekabupaten Bone dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - 4) **Pembinaan Aparat Pemdes dalam Pengelolaan Ekonomi Kerakyatan**, dengan capaian yaitu Terlaksananya Pembinaan Aparat Pemdes dalam peningkatan Kapasitas khususnya dalam bidang pengelolaan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan di Surabaya, Malang dan Yogyakarta yang diikuti oleh 328 Kepala Desa Sekabupaten Bone.
6. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.115.594.500,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.110.244.500,-** atau 99,52 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. program ini didukung dengan kegiatan :
- 1) **Pembinaan Administrasi Desa**, dengan capaian meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Administrasi Desa sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Adminstrasi Desa.
 - 2) **Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**, dengan capaian yaitu Sebanyak 328 Kepala Desa mengikuti Bimtek dalam rangka peningkatan pendampingan pengawalan dan pengelolaan dana desa yang berbasis IT.
 - 3) **Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama**, dengan capaian yaitu meningkatnya kerjasama antar desa dan bertambahnya Pembentukan BKAD di setiap Kecamatan.
 - 4) **Sosialisasi Kerjasama Desa**, dengan capaian yaitu meningkatnya kesediaan dan kesiapan para kepala desa untuk melaksanakan Kerjasama antar Desa.
 - 5) **Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa**, dengan capaian Yaitu Sebanyak 328 BPD telah ditingkatnya Kapasitasnya melalui pelatihan tentang peran dan fungsi BPD terhadap pengawasan dana desa.

7. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 425.023.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 425.023.000,-** atau 100 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Pameran Kelompok Perempuan Hari Kesatuan Gerak PKK**, dengan capaian yaitu Terlaksananya Pameran Kelompok Perempuan Hari Kesatuan Gerak PKK di Jakarta dan meningkatnya Kualitas Produksi Hasil Kelompok Perempuan.
- 2) Pelatihan MC Bagi Kader PKK**, dengan capaian yaitu Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan kader PKK khususnya dalam bidang Keprotokoleran yang diikuti oleh 100 orang Kader PKK dari 24 Kecamatan.

8. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 356.905.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **356.605.500,-** atau 99.91 persen dan realisasi fisik sebesar 99.91 persen. program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Pelatihan Tim Verifikasi APBDes dan APBDes Tk. Kecamatan**, dengan capaian yaitu Sebanyak 48 orang tim verifikasi dan evaluasi keuangan desa tingkat kecamatan dari 24 Kecamatan mengikuti Pelatihan Tim Verifikasi APBDes dan APBDes Perubahan Tk. Kecamatan dan mampu memahami mekanisme pencairan dana APBDes.
- 2) Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa**, dengan capaian meningkatnya Penyusunan APBDes, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes di 328 Desa.

9. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.037.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 189.037.500,- atau 100 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat DEsa**, dengan capaian yaitu Meningkatkan kapasitas 60 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Sosialisasi Pendidikan Inklusif yang berkebutuhan Khusus**, dengan capaian yaitu Pemerintah Desa memahami pentingnya pendidikan inklusif bagi semua anak dan peran masing – masing stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

10. Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.678.400,- atau 99,96 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan**, dengan capaian yaitu Meningkatkan kesediaan dan kesiapan Desa/Kelurahan dalam mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan (Evaluasi Dari Desa 118 Desa/Kel, Evaluasi Kecamatan 21 Kecamatan, Evaluasi Kabupaten 9 Kecamatan)

11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratis (Paditungka), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.940.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.915.899,- atau 99.98 persen dan realisasi fisik sebesar 99.98 persen. program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Pelatihan Kader Paud**, dengan capaian yaitu Meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan kader Paud yang diikuti oleh 110 orang Kader Paud dalam peningkatan pengembangan anak usia dini.

Tabel ...
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Bone

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2019 Triwulan I	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Daerah								
				Bidang Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100		
122	01	01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	Jumlah Rekening Pemayaran Telepon (Rekening)	48 Rek	100	100	100	48 Rek		
122	01	01	02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;	Jumlah Aparat Yang mendapatkan Jasa Adm. Keuangan (Orang)	45 Orang	100	100	100	45 Orang		
122	01	01	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan;	Jumlah Media yang menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (media)	7 Media	100	100	100	7 Media		
122	01	01	15	Rapat – rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah yang diikuti (Kegiatan)	100	100	100	100	100%		
122	01	01	23	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Adm. Perkantoran (nPaket)	5 Paket	100	100	100	5 Paket		
122	01	01	24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100		
122	01	02		Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional			2 Paket	2 Paket			
122	01	02	05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	8 Unit		3 Paket	3 Paket	8 Unit		
122	01	02	07									

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2019 Triwulan I	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
122.01.02.09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor				Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	5 Unit	6 paket	5 Paket	5 Paket		5 Unit		
122.01.02.10	Pengadaan Mebeleur				Jumlah Pengadaan Mebeleur yang diadakan	1 Paket	6 paket	5 Paket			1 Paket		
122.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;				Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket		
122.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;				Jumlah Kendaraan Dinad yang terpelihara	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket		2 paket		
122.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;				Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket		4 paket		
122.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				Jumlah Gedung Kantor yang di rehabilitasi	1 paket	4 paket	4 paket	4 paket		1 paket		
122.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kegiatannya yaitu :				Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	100	100				
122.01.05.03	Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang – Undangan.				Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek		1 Keg						
122.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :				Cakupan Realisasi Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100		100				
122.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dengan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		5 dok	5 dok	5 dok				
122.01.06.02	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		4 dok	4 dok	4 dok				
122.01.08	Program Penunjang Pemerintahan Umum				Cakupan realisasi kegiatan penunjang Pemerintahan Umum								
122.01.08.01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	7 Dokumen					7 Dokumen		
122.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				Indeks Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		95.75		95.05				

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2019 Triwulan I	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
122.01.15.15	Pembinaan Desa Dalam Mengikuti Perlombaan Desa/Kelurahan				Jumlah Desa yang mengikuti Perlombaan Desa/Kelurahan		20 Kec, 16 Desa, 7 kelurahan						
122.01.15.16	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pedesaan Dalam Penerapan TTG (Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna)				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelompok dalam Penerapan TTG	1 Keg	1 Keg	1 Keg.	1 Keg.		1 Keg		
122.01.15.17	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pedesaan Dalam Penerapan TTG (Sosialisasi dan Lomba Inovasi TTG)				Jumlah wilayah Pemberdayaan Kelompok dalam Penerapan TTG		4 wil						
122.01.15.23	Monitoring, Evaluasi Aset PNPM Mandiri Pedesaan				Jumlah Kecamatan yang di monitoring dan di evaluasi		14 Kec						
122.01.15.30	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat				Jumlah Lembaga Masyarakat yang di bina	40 Lembaga					40 Lembaga		
122.01.15.34	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Partisipatif Program Primkes				Jumlah orang yang dilatih		80 org						
122.01.15.38	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dalam Pendataan Profil Desa/Kelurahan				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat		1 Keg	1 Keg.	1 Keg.				
122.01.15.39	Peningkatan Keberdayaan Kepala Dusun di Kabupaten Bone				Jumlah orang yang dilatih		1048 Org						
122.01.15.40	Fasilitasi Pembentukan Bumdes Bersama di Kawasan Pedesaan				Jumlah Kecamatan Kawasan Perdesaan		8 Kec						
122.01.15.41	Sosialisasi dan Pelatihan Lembaga Adat Desa				Jumlah orang yang dilatih			354 Org	354 Org				
122.01.15.42	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Desa				Jumlah Desa yang menyusun Perencanaan desa tepat waktu	90 Desa					90 Desa		
122.01.15.43	Rapat Koordinasi Pendamping Desa				Jumlah Pelaksanaan rakor Pendamping desa	6 Kali		4 Kali	4 Kali		6 Kali		
122.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				Berkembangnya Lembaga Ekonomi Pedesaan		100		100				

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2019 Triwulan I	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
122	01	16	27		Pelatihan Teknis Administrasi Keuangan Bagi Pengurus dan Pengelola BUMDES	Jumlah orang yang dilatih	160 org						
122	01	16	29		Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelompok UEP	1 Keg						
122	01	16	30		Pelatihan Publikasi Potensi Ekonomi Komunitas Nelayan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kecamatan Kaeasan Perdesaan	2 Kec	2 Kec	2 Kec				
122	01	16	31		Rakernis Pengelola Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Orang yang mengikuti Rakernis	165 org						
122	01	16	32		Pembinaan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang dibina	6 Kec	8 Kec.	8 Kec.				
122	01	16	33		Bantuan Usaha Ekonomi Perempuan	Jumlah Kelompok yang dibantu	10 Klp						
122	01	16	36		Pembinaan, Evaluasi dan Publikasi Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan Kab. Bone	Jumlah Kawasan yang dibina	8 Kecamatan				8 Kecamatan		
122	01	16	43		Evaluasi dan Pembinaan Penertaan Modal BUMDES	Jumlah Bumdes yang dibina	1 Kegiatan	303 Bumdes	303 Bumdes		1 Kegiatan		
122	01	16	33		Pembinaan Aparat Pemdes dalam Pengelola Ekonomi Kerakyatan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Aparat Pemdes dalam Pengelola Ekonomi Kerakyatan		328 Kades	328 Kades				
122	01	17			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	100		100				
122	01	17	04		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Data Profil Desa dan Kelurahan Yang di monev	372 Desa/Kel				372 Desa/Kel		
122	01	17	07		Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional dan Kabupaten	Jumlah Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional dan Kabupaten	1 Keg						
122	01	17	11		Pembinaan Desa/Kelurahan Dalam Mengikuti P2WKSS	Jumlah Pembinaan Desa/Kelurahan Dalam Mengikuti P2WKSS	1 Keg						
122	01	17	13		Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terpilih	10 Desa				10 Desa		
122	01	17	14		Pemilihan Kepala Desa Antar waktu	Jumlah PAW	8 Desa				8 Desa		
122	01	18			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100		99.52				

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2019 Triwulan I	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
122 01 18 10	Pembinaan Administrasi Desa				Jumlah Desa yang di bina		328 Desa	328 Desa	328 Desa				
122 01 18 12	Peningkatan Kapasitas KPMD				Jumlah Jumlah Kader PMD yang ditingkatkan Kapasitasnya		60 org						
122 01 18 13	Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa				Jumlah Kepala Desa yang mengikuti Pelatihan	18 Kades	141 Kades				18 Kades		
122 01 18 14	Pelatihan Siskeudes Bagi Perangkat Desa				Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Pelatihan Siskeudes		656 org						
122 01 18 18	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				Jumlah Aparatur Desa yang ditingkatkan kapasitasnya			328 Kades	328 Kades				
122 01 18 20	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa				Jumlah BKAD yang Di bina, di monitoring dan di evaluasi	24 Lembaga		24 Kec.	24 Kec.		24 Lembaga		
122 01 18 21	Sosialisasi Kerjasama Desa				Jumlah Sosialisasi Kerjasama Desa			1 Keg.	1 Keg.				
122 01 18 22	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa				Jumlah Anggota BPD yang dilatih			328 BPD	328 BPD				
122 01 18 23	Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun RPJMDES				Jumlah Tim Penyusun RPJMDES yang ditingkatkan	20 Orang					20 Orang		
122 01 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan				Meningkatnya Peran Perempuan ddi Pedesaan		100		100				
122 01 19 08	Operasional Sekretariat Kelembagaan Pokja Tim PKK				Jumlah Kegiatan Operasional Sekretariat Kelembagaan Pokja TP. PKK		1 Keg						
122 01 19 09	Sarasehan Penguatan TP. PKK Desa/Kelurahan				Jumlah Kecamatan yang mengikuti Kegoatan Sarasehan		27 Kec						
122 01 19 10	Orientasi Kegiatan UP2K TP. PKK				JumlahOrang yang mengikuti Kegaiaatn Orientasi		30 org						
122 01 19 11	Pameran Kelompok Perempuan Hari Kesatuan Gerak PKK				Jumlah Pameran Kelompok Perempuan Hari Kesatuan Gerak PKK	1 Keg	1 Keg	1 Keg.	1 Keg.		1 Keg		
122 01 19 12	Orientasi Penguatan Kelompok Perempuan				Jumlah Orientasi Penguatan Kelompok Perempuan		1 Keg						

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2019 Triwulan I	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
122	01	19	13		Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Budaya Kelompok Perempuan	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Budaya Kelompok Perempuan	1 Keg						
122	01	19	14		Pelatihan Kader Posyandu di Desa	Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti Pelatihan	100 Orang	108 org	100 Org	100 Org	100 Orang		
122	01	19	15		Pelatihan MC Bagi Kader PKK	Jumlah Kader PKK yang di latih			100 Org	100 Org			
122	01	19	19		Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun Desa	Jumlah Peserta Perempuan yang bimtek	328 Orang				328 Orang		
122	01	22			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		99.66		99.91				
122	01	22	01		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Keg						
122	01	22	02		Bimtek Tim Verifikasi dan Evaluasi Keuangan Desa	Jumlah Orang yang mengikuti bimtek	72 Org						
122	01	22	05		Pelatihan Tim Perivikasi APBDES dan APBDES Perubahan Tk. Kecamatan	Jumlah orang yang mngikuti Pelatihan			48 Org	48 Org			
122	01	22	06		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Jumlah Desa yang di bina	328 Desa		328 Desa	328 Desa	328 Desa		
122	01	22	08		Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Desa yang di bina	328 Desa				328 Desa		
122	01	23			Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat					100			
122	01	23	03		Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kader KPMD yang ditingkatkan kapasitasnya	60 Orang		60 Org	60 Org	60 Orang		
122	01	23	05		Sosialisasi Pendidikan Inklusif yang Berkebutuhan Khusus	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi			200 Org	200 Org			
122	01	25			Program Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan					99.96			
122	01	25	03		Evaluasi dan Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
122	01	25	04		Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan							

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2019 Triwulan I	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
122	01	27		Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Paditungka)				99.98				
122	01	27	09	Pelatihan Kader Paud	Jumlah Orang yang di latih		110 Org	110 Org				
122	01	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru		100						
122	01	27	09	Pemilihan Kepala Desa	Jumlah PAW	1 desa	1 desa			1 desa		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, dapat dilihat dari Struktur Organisasi yang terdiri atas 4 Bidang dan 1 Sekretariat yang terdiri atas : Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Bina Pengembangan Kerjasama Evaluasi Desa dan Kelurahan, Bidang Bina Pemberdayaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Bidang Bina Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, dan Sekretariat.

Adapun Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa, serta unsur lain yang ada di Desa.

Secara lengkap kinerja pelayanan Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Bone dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel ..
Jumlah Kepala Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bone Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Kades Menurut Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	AJANGALE	10	2	12
2	AMALI	8	6	14
3	AWANGPONE	12	5	17
4	BAREBBO	11	6	17
5	BENGO	9		9
6	BONTOCANI	9	1	10
7	CENRANA	14	1	15
8	CINA	9	2	11
9	DUA BOCCOE	16	5	21
10	KAHU	16	3	19
11	KAJUARA	17		17
12	LAMURU	9	2	11
13	LAPPARIAJA	8	1	9
14	LIBURENG	17	1	18
15	MARE	16	1	17
16	PALAKKA	12	3	15
17	PATIMPENG	8	2	10
18	PONRE	8	1	9
19	SALOMEKKO	6	1	7
20	SIBULUE	16	3	19
21	TELLU LIMPOE	10	1	11
22	TELLU SIATTINGE	9	6	15
23	TONRA	11		11
24	ULAWENG	9	5	14
	JUMLAH	270	58	328

Tabel ..
Jumlah Perangkat Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bone
Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Kades Menurut Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	AJANGALE	63	35	98
2	AMALI	83	28	111
3	AWANGPONE	106	55	161
4	BAREBBO	85	46	131
5	BENGO	59	14	73
6	BONTOCANI	67	22	89
7	CENRANA	88	45	133
8	CINA	67	35	102
9	DUA BOCCOE	124	46	170
10	KAHU	152	19	171
11	KAJUARA	107	39	146
12	LAMURU	72	20	92
13	LAPPARIAJA	74	6	80
14	LIBURENG	134	32	166
15	MARE	105	32	137
16	PALAKKA	67	64	131
17	PATIMPENG	74	17	91
18	PONRE	67	30	97
19	SALOMEKKO	45	13	58
20	SIBULUE	111	63	174
21	TELLU LIMPOE	61	22	83
22	TELLU SIATTINGE	97	51	148
23	TONRA	71	25	96
24	ULAWENG	85	45	130
	JUMLAH	2064	804	2868

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	-	-	85%	90%	93%	95%	85%		93%	95%	
2	Persentase Desa yang telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa			60%	68%	70%	84%	60%		70%	84%	
3	cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik			85%	88%	92%	95%	85%		92%	95%	
4	Persentase LPM Aktif			97%	100%	100%	100%	97%		100%	100%	
5	Persentase LPM Berprestasi			6.7%	7.50%	9.10%	10.90%	6.7%		9.10%	10.90%	
6	Persentase Lembaga Adat Aktif			20%	40%	60%	80%	20%		60%	80%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Persentase PKK Aktif			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
8	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
9	Persentase Posyandu Aktif			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
10	Persentase Peningkatan Jumlah Bumdes Aktif			92%	100%	100%	100%	92%		100%	100%	
11	Persentase Desa yang Menerapkan TTG			92%	100%	100%	100%	92%		100%	100%	

Melihat tabel 30 mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone diatas rata-rata indikator yang ada sudah tercapai dan bahkan ada yang sudah mencapai target yang telah ditentukan diantaranya yaitu : Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dengan rasio capaian sebesar sampai dengan tahun 2018 sebesar 85%, Persentase Desa yang telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa pada tahun 2018 telah dicapai sebesar 60% sama dengan target yang telah ditentukan, cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik telah mencapai 85%, Persentase LPM aktif telah mencapai 97%, dan diantara LPM yang aktif sebanyak 6,7% telah menunjukkan sebagai LPM berprestasi, Persentase Lembaga Adat Aktif sebanyak 20% lembaga, Persentase PKK Aktif sebanyak 100% yang menunjukkan bahwa semua PKK yang ada di desa berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana terdapat rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK masing-masing terdapat 1 binaan perdesa, Capaian Persentase Posyandu Aktif sebesar 100% yang menunjukkan bahwa setiap posyandu yang ada di desa memberikan layanan yang berkesinambungan kepada masyarakat, Capaian Persentase Peningkatan Jumlah Bumdes Aktif sebesar 92%, atau sebanyak 303 Bumdes dan hanya tersisa 25 desa yang belum memiliki Bumdes, dan Persentase Desa yang Menerapkan TTG telah mencapai 92%.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DPMD dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan beberapa fungsinya. Diantaranya yaitu pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan menjalankan tugas dan fungsinya tersebut DPMD menghadapi

beberapa pula permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan (weakness) apabila tidak ditangani segera secara intensif. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMD , adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
2. Kurangnya kapasitas Kepala Desa dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat;
3. Tidak berimbangnya antara luasnya daerah binaan dan banyaknya daerah binaan dengan SDM aparatur;
4. Kurangnya koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari tingkat daerah dan desa;
5. Rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah berdasarkan identifikasi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Telaah Visi dan Misi Bupati Terpilih

No	Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik	Kurangnya Profesionalisme SDM Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Upaya penguatan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.	Tidak berimbangnya antara luas daerah binaan dan banyaknya daerah binaan dengan jumlah aparatur	Kurangnya jumlah aparatur DPMD dalam pembinaan pengembangan kemandirian ekonomi	Dukungan pengembangan kemandirian melalui peran Pendamping Profesional pada kegiatan pemberdayaan
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas	Jumlah penduduk lebih besar dibanding jumlah	Banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis	Adanya program-program kesehatan, pendidikan dan social

No	Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	cakupan layanan social dasar di tingkat Desa	kemiskinan	dasar lainnya pada masyarakat kurang mampu
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Banyaknya desa-desa yang masih tertinggal dalam pembangunan	Tingginya ketimpangan pembangunan daerah diwilayah perkotaan dan perdesaan	Pengembangan produk unggulan desa, mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha
5	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya keberadaan BUMDES di Desa - Perubahan regulasi pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya peranan masyarakat dalam pengembangan inovasi desa - Kapasitas SDM Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kreativitas dan pengembangan inovasi Desa - Terbentuknya Wadah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (WARKOPP DESA)
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Menurunnya nilai-nilai social masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya local	Pudarnya semangat gotong royong, tolong menolong, tudang sipulung dan semakin tingginya individualisme	Pelestarian nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat

1. Tantangan

Dalam melakukan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menghadapi beberapa tantangan yang harus bisa di atasi, adapun tantangan itu antara lain:

- Masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat.
- Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan apratur pemerintahan desa,

masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa

- c. Kurangnya pemahaman atas pentingnya kerjasama desa.
- d. Minimnya fasilitasi pemerintah pusat dan daerah dalam kerjasama desa.
- e. Lembaga kerjasama desa dalam hal ini Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- f. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal sebagai efek dari kuatnya dinamika pembangunan
- g. Peranan organisasi non pemerintah yang melakukan pembinaan selama ini tidak teridentifikasi, cenderung melakukan pembinaan tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- h. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
- i. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,
- j. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,
- k. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat,
- l. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- m. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

2. Peluang

Selain tantangan, terdapat juga peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pembangunan, peluang itu antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat

- b. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PDT dan Transmigrasi serta Kementerian/Lembaga Non Kementerian lainnya sebagai tindak lanjut dari program NAWA CITA Presiden yang diarahkan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pendanaan Dana Desa dari APBN.
- c. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.
- d. Tersedianya tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa di desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

3.1 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa masih kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan. Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.
2. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa.
Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.
3. Menurunnya nilai – nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal.
Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti : tolong menolong,

gotong royong, tudang sipulung dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai social (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

4. Masih Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpasrtisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkakan kesejahteraan keluarga.

5. Belum Optimalnya Lembaga ekonomi Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan perekonomian desa melalui Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

6. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Tehnologi Tepat Guna serta lingkungan hidup

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa

dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan. Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

7. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Dalam membangun good governance bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan. Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2020 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2020 rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan pada Tabel berikut ini :

Tabel T.C 31

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				638.180.800,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				638.180.800,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas PMD Kabupaten Bone	Jumlah rekening telepon	48 Rekening	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas PMD Kabupaten Bone	Jumlah rekening telepon	48 Rekening	20.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas PMD Kabupaten Bone	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan	45 Orang	160.628.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas PMD Kabupaten Bone	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan	45 Orang	160.628.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMD Kabupaten Bone	Jumlah Media	10 Media	17.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMD Kabupaten Bone	Jumlah Media	10 Media	17.000.000,00
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	100 Kegiatan	300.000.000,00	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	100 Kegiatan	300.000.000,00
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Paket Penunjang Administrasi Perkantoran	5 Paket	157.552.800,00	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Paket Penunjang Administrasi Perkantoran	5 Paket	157.552.800,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				756.000.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				756.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah kendaraan dinas	3 Unit Motor	100.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah kendaraan dinas	3 Unit Motor	100.000.000,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah unit	4 (2 Filing Kabinet, 1 Sound System, 1 Proyektor) Unit	85.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah unit	4 (2 Filing Kabinet, 1 Sound System, 1 Proyektor) Unit	85.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah unit	10 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah unit	10 Unit	100.000.000,00
	Pengadaan Mebeleur	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Paket	5 Paket	250.000.000,00	Pengadaan Mebeleur	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Paket	5 Paket	250.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kantor Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Paket	1 Paket	6.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kantor Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Paket	1 Paket	6.500.000,00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah unit	24 Unit	143.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah unit	24 Unit	143.500.000,00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Unit	10 Unit	21.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Unit	10 Unit	21.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kantor Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Unit	32 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kantor Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Unit	32 Unit	50.000.000,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				40.000.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				40.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Pakaian Dinas	30 Pasang	40.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Pakaian Dinas	30 Pasang	40.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				175.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				175.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah aparat yang mendapat Bimtek	5 Orang	50.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah aparat yang mendapat Bimtek	5 Orang	50.000.000,00
	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Aparat	5 Orang	125.000.000,00	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Aparat	5 Orang	125.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.000.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.000.000,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	15.000.000,00
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00
	Program Penunjang Pemerintahan Umum				145.000.000,00	Program Penunjang Pemerintahan Umum				145.000.000,00
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Dinas PMD Kab. Bone	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	100.000.000,00
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Dinas PMD Kab. Bone	Tersedianya Paket Website	1 Paket	45.000.000,00	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Dinas PMD Kab. Bone	Tersedianya Paket Website	1 Paket	45.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				1.593.114.000,00	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				1.593.114.000,00
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Kabupaten Bone	Jumlah masyarakat yang mengikuti desiminasi	100 Orang	200.000.000,00	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Kabupaten Bone	Jumlah masyarakat yang mengikuti desiminasi	100 Orang	200.000.000,00
	pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan dalam penerapan TTG penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna	Luar Kota	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	187.350.000,00	pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan dalam penerapan TTG penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna	Luar Kota	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	187.350.000,00
	Pelatihan Fasilitator Kabupaten Prima Kesehatan dan Tim Pokjakes Desa	Kabupaten Bone	Jumlah pengurus FKKS yang dilatih	100 Orang	200.000.000,00	Pelatihan Fasilitator Kabupaten Prima Kesehatan dan Tim Pokjakes Desa	Kabupaten Bone	Jumlah pengurus FKKS yang dilatih	100 Orang	200.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang dibina	60 Lembaga	52.924.000,00	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang dibina	60 Lembaga	52.924.000,00
	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Partisipatif Program Primkes	Kabupaten Bone	Jumlah anggota Pokja yang mengikuti pelatihan	100 Orang	200.000.000,00	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Partisipatif Program Primkes	Kabupaten Bone	Jumlah anggota Pokja yang mengikuti pelatihan	100 Orang	200.000.000,00
	Bimtek dan Penguatan Kader Posyandu	Kabupaten Bone	Jumlah kader yang mengikuti Bimtek	100 Orang	200.000.000,00	Bimtek dan Penguatan Kader Posyandu	Kabupaten Bone	Jumlah kader yang mengikuti Bimtek	100 Orang	200.000.000,00
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Desa yang menyusun perencanaan desa	93 Desa	200.000.000,00	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Desa yang menyusun perencanaan desa	93 Desa	200.000.000,00
	Rapat Koordinasi Pendamping Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Rakor Pendampingan	6 Kegiatan	152.840.000,00	Rapat Koordinasi Pendamping Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Rakor Pendampingan	6 Kegiatan	152.840.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Partisipatif Program Primkes	Kabupaten Bone	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	1 Kegiatan	200.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Partisipatif Program Primkes	Kabupaten Bone	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	1 Kegiatan	200.000.000,00
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				4.117.750.000,00	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				4.117.750.000,00
	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan	Kabupaten Bone	Jumlah peserta terlatih	30 Orang	200.000.000,00	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan	Kabupaten Bone	Jumlah peserta terlatih	30 Orang	200.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha MikroKecil Dan Menengah Di Perdesaan	Kabupaten Bone	Jumlah UMKM yang difasilitasi	30 Unit	100.000.000,00	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha MikroKecil Dan Menengah Di Perdesaan	Kabupaten Bone	Jumlah UMKM yang difasilitasi	30 Unit	100.000.000,00
	Sosialisasi Pengembangan Industri Rumah Tangga Berbasis Komoditas (Kepiting dan Kelapa)	Kabupaten Bone	Jumlah kegiatan sosialisasi	1 Kegiatan	150.000.000,00	Sosialisasi Pengembangan Industri Rumah Tangga Berbasis Komoditas (Kepiting dan Kelapa)	Kabupaten Bone	Jumlah kegiatan sosialisasi	1 Kegiatan	150.000.000,00
	Pelatihan Pengembangan Produksi Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat (Bimbingan Teknis dan Publikasi Hasil Industri Rumah Tangga di Lokasi Pameran TTG tingkat Nasional)		Kegiatan pelaksanaan Publikasi dan Bimtek	1 Kegiatan	250.000.000,00	Pelatihan Pengembangan Produksi Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat (Bimbingan Teknis dan Publikasi Hasil Industri Rumah Tangga di Lokasi Pameran TTG tingkat Nasional)		Kegiatan pelaksanaan Publikasi dan Bimtek	1 Kegiatan	250.000.000,00
	Pelatihan Penguatan Manajemen Kelembagaan Pasar Desa/Tradisional (Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa)	Kabupaten Bone	Jumlah peserta Bimtek	30 Orang	200.000.000,00	Pelatihan Penguatan Manajemen Kelembagaan Pasar Desa/Tradisional (Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa)	Kabupaten Bone	Jumlah peserta Bimtek	30 Orang	200.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Kekayaan Desa.	Kabupaten Bone	Jumlah aparat desa terlatih	30 Orang	200.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Kekayaan Desa.	Kabupaten Bone	Jumlah aparat desa terlatih	30 Orang	200.000.000,00
	Pelatihan usaha ekonomi keluarga	Kabupaten Bone	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	200.000.000,00	Pelatihan usaha ekonomi keluarga	Kabupaten Bone	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	200.000.000,00
	Orientasi Lapangan Dalam Rangka Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga		Jumlah kegiatan pelaksanaan Orientasi Lapangan	1 Kegiatan	200.000.000,00	Orientasi Lapangan Dalam Rangka Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga		Jumlah kegiatan pelaksanaan Orientasi Lapangan	1 Kegiatan	200.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan kapasitas Pengelola BUMDES dan LKM Pedesaan	Kabupaten Bone	Jumlah Pengelola Bumdes yang dilatih	100 Orang	400.000.000,00	Peningkatan kapasitas Pengelola BUMDES dan LKM Pedesaan	Kabupaten Bone	Jumlah Pengelola Bumdes yang dilatih	100 Orang	400.000.000,00
	Rakernis Pengelola Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten Bone	Jumlah kegiatan pelaksanaan Rakernis	1 Kegiatan	200.000.000,00	Rakernis Pengelola Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten Bone	Jumlah kegiatan pelaksanaan Rakernis	1 Kegiatan	200.000.000,00
	Pelatihan Teknis Administrasi Keuangan Bagi Pengurus dan Pengelola Bumdes	Kabupaten Bone	Jumlah pengurus dan pengelola Bumdes yang dilatih	120 Orang	200.000.000,00	Pelatihan Teknis Administrasi Keuangan Bagi Pengurus dan Pengelola Bumdes	Kabupaten Bone	Jumlah pengurus dan pengelola Bumdes yang dilatih	120 Orang	200.000.000,00
	Pembinaan, Evaluasi dan Publikasi Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan Kabupaten Bone	Kabupaten Bone	Jumlah Kawasan Perdesaan yang dibina	33 Desa	196.000.000,00	Pembinaan, Evaluasi dan Publikasi Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan Kabupaten Bone	Kabupaten Bone	Jumlah Kawasan Perdesaan yang dibina	33 Desa	196.000.000,00
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Perdesaan	Kabupaten Bone	Jumlah Pengelola Kawasan Perdesaan	100 Orang	300.000.000,00	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Perdesaan	Kabupaten Bone	Jumlah Pengelola Kawasan Perdesaan	100 Orang	300.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Strategi Pengembangan BUMDES	Kabupaten Bone	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	300.000.000,00	Penyusunan Dokumen Strategi Pengembangan BUMDES	Kabupaten Bone	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	300.000.000,00
	Pembinaan Asosiasi BUMDES Kab. Bone	Kabupaten Bone	Jumlah Asosiasi Bumdes yang dibina	Asosiasi	105.100.000,00	Pembinaan Asosiasi BUMDES Kab. Bone	Kabupaten Bone	Jumlah Asosiasi Bumdes yang dibina	Asosiasi	105.100.000,00
	Pembinaan Bumdes Berprestasi Kab. Bone	Kabupaten Bone	Jumlah Bumdes berprestasi	10 Bumdes	200.000.000,00	Pembinaan Bumdes Berprestasi Kab. Bone	Kabupaten Bone	Jumlah Bumdes berprestasi	10 Bumdes	200.000.000,00
	Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal BUMDES	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan evaluasi dan pembinaan	1 Kegiatan	416.650.000,00	Evaluasi dan Pembinaan Penyertaan Modal BUMDES	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan evaluasi dan pembinaan	1 Kegiatan	416.650.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan BUMDES Bersama Kawasan Perdesaan	Kabupaten Bone	Jumlah Bumdes Bersama di Kawasan Perdesaan	Bumdes	300.000.000,00	Pembinaan BUMDES Bersama Kawasan Perdesaan	Kabupaten Bone	Jumlah Bumdes Bersama di Kawasan Perdesaan	Bumdes	300.000.000,00
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				793.875.000,00	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				793.875.000,00
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Kabupaten Bone	Jumlah Data Profil Desa/Kelurahan	372 Desa/Kelur	200.000.000,00	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Kabupaten Bone	Jumlah Data Profil Desa/Kelurahan	372 Desa/Kelur	200.000.000,00
	Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan	Kabupaten Bone	Jumlah Desa/Kelurahan	372 Desa/Kelur	100.000.000,00	Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan	Kabupaten Bone	Jumlah Desa/Kelurahan	372 Desa/Kelur	100.000.000,00
	Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Kabupaten Bone	Jumlah PAW	5 Desa	293.875.000,00	Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Kabupaten Bone	Jumlah PAW	5 Desa	293.875.000,00
	Pengukuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kabupaten Bone	Jumlah Anggota BPD yang dikukuhkan	328 1622	200.000.000,00	Pengukuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kabupaten Bone	Jumlah Anggota BPD yang dikukuhkan	328 1622	200.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				2.779.617.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				2.779.617.000,00
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah aparat yang dilatih	328 Orang	293.090.000,00	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah aparat yang dilatih	328 Orang	293.090.000,00
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah aparat yang mendapat pelatihan	328 Orang	300.000.000,00	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah aparat yang mendapat pelatihan	328 Orang	300.000.000,00
	Bimbingan Teknis Kepala Desa	Desa Bainang (Kecamatan Palakka)	Jumlah Peserta (seluruh Kepala Desa)	328 Orang	299.100.000,00	Bimbingan Teknis Kepala Desa	Desa Bainang (Kecamatan Palakka)	Jumlah Peserta (seluruh Kepala Desa)	328 Orang	299.100.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kabupaten Bone					Kabupaten Bone			
	Bimbingan Teknis Perangkat Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Bimtek	328 Orang	300.000.000,00	Bimbingan Teknis Perangkat Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Bimtek	328 Orang	300.000.000,00
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kabupaten Bone	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek	328 Orang	299.625.000,00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kabupaten Bone	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek	328 Orang	299.625.000,00
	Pelatihan Aparat Pemerintah Desa Dalam Bidang Politik Hukum Desa	Kabupaten Bone	Jumlah aparat yang terlatih dalam bidang politik hukum desa	328 Orang	299.292.000,00	Pelatihan Aparat Pemerintah Desa Dalam Bidang Politik Hukum Desa	Kabupaten Bone	Jumlah aparat yang terlatih dalam bidang politik hukum desa	328 Orang	299.292.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama	Kabupaten Bone	Jumlah BKAD yang dibina	24 Lembaga	100.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama	Kabupaten Bone	Jumlah BKAD yang dibina	24 Lembaga	100.000.000,00
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah anggota BPD yang terlatih	328 Orang	293.690.000,00	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah anggota BPD yang terlatih	328 Orang	293.690.000,00
	Pelatihan Manajemen Kekayaan dan Aset Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Aparat yang mengikuti pelatihan manajemen kekayaan dan aset desa	328 Orang	299.240.000,00	Pelatihan Manajemen Kekayaan dan Aset Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Aparat yang mengikuti pelatihan manajemen kekayaan dan aset desa	328 Orang	299.240.000,00
	Pelatihan Administrasi Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Tenaga Administrasi Desa yang terlatih	328 Orang	295.580.000,00	Pelatihan Administrasi Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Tenaga Administrasi Desa yang terlatih	328 Orang	295.580.000,00
	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan				1.784.600.000,00	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan				1.784.600.000,00
	Revitalisasi Pokjandal Posyandu	Kabupaten Bone	Jumlah Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00	Revitalisasi Pokjandal Posyandu	Kabupaten Bone	Jumlah Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Industri Rumah Tangga PKK	Kabupaten Bone	Jumlah peserta pelatihan	100 Orang	200.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelompok Industri Rumah Tangga PKK	Kabupaten Bone	Jumlah peserta pelatihan	100 Orang	200.000.000,00
	Sarasehan Penguatan TP.PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	Kabupaten Bone	Jumlah kegiatan sarasehan	1 Kegiatan	200.000.000,00	Sarasehan Penguatan TP.PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	Kabupaten Bone	Jumlah kegiatan sarasehan	1 Kegiatan	200.000.000,00
	Pelatihan Kader Posyandu Di Desa	Kabupaten Bone	Jumlah kader posyandu yang dilatih	100 Orang	200.000.000,00	Pelatihan Kader Posyandu Di Desa	Kabupaten Bone	Jumlah kader posyandu yang dilatih	100 Orang	200.000.000,00
	Pelatihan MC Bagi Kader PKK	Kabupaten Bone	Jumlah peserta pelatihan	100 Orang	200.000.000,00	Pelatihan MC Bagi Kader PKK	Kabupaten Bone	Jumlah peserta pelatihan	100 Orang	200.000.000,00
	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan untuk Turut Serta dalam Pembangunan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi	100 Orang	200.000.000,00	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan untuk Turut Serta dalam Pembangunan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi	100 Orang	200.000.000,00
	Pelatihan Pengurus Kader Pokja Desa Sehat	Kabupaten Bone	Jumlah Pengurus	100 Orang	200.000.000,00	Pelatihan Pengurus Kader Pokja Desa Sehat	Kabupaten Bone	Jumlah Pengurus	100 Orang	200.000.000,00
	Bimtek Pemberdayaan PerempuanPerdesaan dalam Membangun Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Peserta PerempuanYang ng Bimtek	20 Orang	184.600.000,00	Bimtek Pemberdayaan PerempuanPerdesaan dalam Membangun Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Peserta PerempuanYang Bimtek	20 Orang	184.600.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan pada Hari Kesatuan Gerak PKK	Kabupaten Bone	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Yang diikuti	1 Kegiatan	200.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan pada Hari Kesatuan Gerak PKK	Kabupaten Bone	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Yang diikuti	1 Kegiatan	200.000.000,00
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa				695.000.000,00	Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa				695.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Seluruh desa di Kab. Bone	Jumlah Desa yang dibina	328 Desa	300.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Seluruh desa di Kab. Bone	Jumlah Desa yang dibina	328 Desa	300.000.000,00
	Pelatihan Tim Verifikasi APBDes dan APBDes Perubahan Tingkat Kecamatan	Kabupaten Bone	Jumlah aparat yang dilatih	72 Orang	275.000.000,00	Pelatihan Tim Verifikasi APBDes dan APBDes Perubahan Tingkat Kecamatan	Kabupaten Bone	Jumlah aparat yang dilatih	72 Orang	275.000.000,00
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah desa yang dibina	328 Desa	120.000.000,00	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Bone	Jumlah desa yang dibina	328 Desa	120.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat				26.380.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat				26.380.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Kader PMD yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang	26.380.000,00	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten Bone	Jumlah Kader PMD yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang	26.380.000,00
	Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan				400.000.000,00	Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan				400.000.000,00
	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bone	Jumlah dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bone	Jumlah dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bone Tahun 2020, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah kabupaten Bone juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.** Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan, dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjutisampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isuisu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Tabel Tc. 32

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Bimbingan Teknis Kepala Desa	Kab. Bone	Jumlah Kepala Desa Yang Dilatih	328 Desa	
	Bimbingan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kab. Bone	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek	328 Desa	
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD	Kab. Bone	Jumlah Anggota BPD yang dilatih	328 Desa	

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara perangkat Daerah kabupaten dengan Kementerian/Lembaga dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilakukan Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi, Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI), dan Perangkat Daerah Provinsi yang terkait, yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dengan Kementerian Dalam Negeri adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dengan Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah :

1. meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,35 persen;
2. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen; dan
3. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 71,5.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;
2. Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
3. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan penguasaan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin
5. Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kab. Bone Tahun 2020 yang ditetapkan sebagai konsep awal (rancangan teknokratis) dalam masa transisi Pemerintahan Kab. Bone dari Periode Lima Tahun sebelumnya (Tahun 2013-2018) menuju Periode Lima Tahun selanjutnya (Tahun 2018-2023) adalah sebagai berikut:

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu:

Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018-2023, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Bone ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone, maka dapat ditelaah dari semua Misi mulai dari 1 (satu) sampai dengan misi ke 4 (empat) dan Misi ke 6 (enam) dari RPJMD Kabupaten Bone.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun

2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggungjawab
2. Mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan masyarakat yang berada diatas garis kemiskinan
3. Meningkatkan sumber daya masyarakat perdesaan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
4. Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa dan perkotaan
6. Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat
Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pelestarian dan pengembangan adat istiadat, seni dan budaya

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, Sumber Daya Manusia aparat pemerintah, lembaga pemberdayaan dan masyarakat desa
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan lembaga masyarakat desa
3. Meningkatnya peran Aktif kader PKK Desa
4. Meningkatnya pemahaman dan keterampilan kader posyandu yang terintegrasi di desa
5. Meningkatnya desa – desa yang mengelola sumber daya unggulan diwilayahnya masing – masing
6. Meningkatnya dunia usaha dan masyarakat pengusaha
7. Terbentuknya Lembaga Adat desa

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bone Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan.

Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan harus dititik beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan desa. Peningkatan kinerja pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan kapasitas keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi pembangunan, peningkatan ekonomi perdesaan, peningkatan usaha pelestarian lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan adat dan sosial budaya. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 terlampir pada table 3.1 tentang ***Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019*** berikut ini :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone merupakan program prioritas Renstra yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD PROV, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Program Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa , Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	
	Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	
	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	
2	Program	

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone tahun 2020 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksana

an program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Watampone , 2019
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BONE**

H. A. ARSYAD , SH, M.Si
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP. 19620110 199101 1 003